

PENGARUH *FLYPAPER EFFECT* TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Nareswari Adyanindita Kusumawardhani Kusyala
STIE YKPN

Rudy Badrudin
STIE YKPN

e-mail: rudybadrudin.stieykpn@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to identify and analyze the phenomenon of the flypaper effect through the regional original revenue (PAD) and general allocation funds (DAU) on capital expenditure (BM) and then there can effect on economic growth and public welfare through the human development index (IPM). The selected areas in this research cover all regencies and cities in West Java Province. This research takes data on the realization of the regional budget for revenue and expenditure (APBD) at the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) of ministry of finance during the 2016-2020 period. The sampling technique used purposive sampling which resulted 135 data from 18 districts and 9 cities in West Java Province. The test results in this research indicate that PAD nad DAU have positive and significant effect on capital expenditure and show that there is no flypaper effect. The test results also that capital expenditure has positive and significant effect on economic growth, but economic growth is unable to affect public welfare.

Keywords: *economic growth, welfare, flypaper effect*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis fenomena *flypaper effect* melalui pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum (DAU) terhadap belanja modal (BM) kemudian pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui indeks pembangunan manusia (IPM). Daerah yang terpilih meliputi seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini mengambil data Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan selama periode 2016-2020. Populasi dalam penelitian ini seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* yang menghasilkan 135 data dari 18 Kabupaten dan 9 Kota di Provinsi Jawa Barat. Hasil pengujian pada penelitian ini menunjukkan bahwa PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal dan menunjukkan hasil tidak terjadi *flypaper effect*. Hasil pengujian juga menunjukkan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, namun pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, *flypaper effect*

JEL: H72

1. PENDAHULUAN

Banyaknya negara berkembang merubah pola hubungan pemerintahan menjadi desentralisasi sebagai wujud pemberian wewenang kekuasaan. Desentralisasi digunakan untuk meningkatkan kemandirian dan keseimbangan efektivitas dan efisiensi makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Tuntutan pemerintah daerah terhadap keinginan untuk wewenang mengatur daerahnya masing-masing. Desentralisasi di Indonesia didukung oleh paket undang-undang otonomi daerah UU No 33 tahun 2004 dan UU No 23 tahun 2014. Penerbitan UU No 17 tahun 2003 menimbulkan adanya kewajiban pemerintah dalam menyusun Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) guna meningkatkan kontribusi masyarakat melalui transparansi keuangan.

Pada pos pendapatan APBD terdapat pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan hasil kemampuan asli daerah dimana PAD hanya mampu memberikan persentase alokasi rendah dibanding dana perimbangan. PAD hanya mampu memenuhi 20% dari total pendapatan daerah (Iskandar, 2012) dan menjadi sumber alokasi belanja daerah, tapi besaran PAD di bawah dana perimbangan (Subadriyah & Solikul, 2018). PAD rendah mengakibatkan turutan pemerintah pusat untuk meembantu keuangan daerah melalui dana perimbangan guna mengatasi kesenjangan fiskal terjadi.

Dana perimbangan salah satunya dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang dialokasikan belanja daerah dengan tuntutan laporan pertanggungjawaban APBD. DAU memiliki nominal lebih besar dari dana perimbangan lain karena fungsinya mengatasi kesenjangan fiskal. Wewenang penggunaan seluasnya dari pemerintah daerah dan menuntut laporan pertanggungjawaban (Kusumadewi & Rahman, 2007) itulah DAU. Karena penggunaan belanja daerah semakin besar, maka alokasi DAU akan semakin besar setiap tahunnya (Mulya & Bustamam, 2016) yang menimbulkan masalah baru di pemerintah daerah.

Pengeluaran dalam belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk pembangunan daerah. Tersedianya saran dan prasarana publik mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi sebagai dampak dari realisasi belanja modal. Pengelolaan aset dan pengadaan aset tetap pemerintah berguna sebagai pendukung kegiatan pemerintah pusat dan daerah (Mirza, 2012).

PAD menjadi cermin kemandirian daerah dalam pengelolaan sumber daya melalui belanja daerah, tapi ketidakmampuan pemerintah daerah dalam pemenuhan pendapatan daerah menimbulkan dana perimbangan. Hal ini menyebabkan timbul salah arti pada respon daerah terhadap dana perimbangan khususnya DAU. Jika ini terjadi fenomena *flypaper effect* terbukti dari dampak DAU pada belanja daerah lebih besar dari dampak PAD di belanja daerah. Jadi, sikap pemerintah sudah menyimpang dalam alokasi belanja daerahnya tanpa imbal balik pada PAD.

Perolehan aset tetap terwujud melalui realisasi alokasi belanja modal yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan jadi jembatan bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal itu dari perhitungan produk domestik bruto dan terjadi karena adanya peningkatan pendapatan daerah dari tahun ke tahun dengan angka tahun dasar sebagai acuan. Pertumbuhan ekonomi ialah hasil dari kegiatan ekonomi sektor produksi barang dan jasa.

Hasil penelitian Ginting *et al.* yang dikutip dalam (Herman, 2017) menunjukkan permasalahan pertumbuhan ekonomi belum mempengaruhi tingkat kesenjangan pembangunan

manusia dan sumberdaya manusia mendorong proses pertumbuhan ekonomi karena penduduk cermin pertumbuhan ekonomi yang cepat. *United Nation Development Indeks Programme* (UNDP) mengeluarkan indeks pembangunan manusia (IPM) yang digunakan badan pusat statistik (BPS) menilai kesejahteraan masyarakat. IPM memiliki tiga faktor dasar; dimensi kesehatan dan harapan hidup, pengetahuan atau pendidikan, dan pemenuhan garis batas kelayakan hidup. Kesejahteraan masyarakat terwujud jika pembangunan manusia mampu menanggulangi masalah mendasar masyarakat (Dwiyandari & Badera, 2018).

Dasar pemilihan lokasi penelitian yang dilakukan dalam penelitian dilihat melalui banyaknya jumlah penduduk yang ada dalam provinsi Jawa Barat dari tahun 2016-2020. Dimana Provinsi Jawa Barat menduduki peringkat pertama dalam jumlah penduduk dari 6 provinsi di Pulau Jawa tahun 2016-2020. Hal ini seharusnya mampu memberikan pengaruh terhadap kegiatan ekonomi yang cenderung tinggi tapi, pertumbuhan ekonomi pada Provinsi Jawa Barat hasilnya cenderung menurun dibawah provinsi dengan jumlah penduduk lebih kecil. Hal itu juga berdampak pada indeks pembangunan manusia yang menunjukkan kesejahteraan masyarakat pada faktor moneterinya. Kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Barat menduduki peringkat 10 besar di Indonesia dan peringkat 4 dibawah daerah yang jumlah penduduk lebih rendah di Pulau Jawa.

2. TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Teori Keagenan

Teori ini membahas mengenai hubungan wewenang menurun dari atas ke bawah yang diberikan *principal* kepada *agent* secara tersirat ataupun tersurat dalam kontrak. Tujuan agar *agent* dapat menjalankan tugas sesuai keinginan *principal*. Hubungan ini menemukan masalah karena perbedaan tujuan *agent* dengan *principal* dan *principal* tidak mampu melihat perilaku *agent* dengan benar (Jensen & Meckling, 1976). Oleh sebab itu menimbulkan informasi asimetris yang membawa hubungan wewenang ini terjadi *moral hazard* dan *advers selection* (Eisenhardt, 2018). Teori ini digunakan dalam penerapan kebijakan publik melalui pemerintah pusat sebagai *principal* dan pemerintah daerah sebagai *agent* (Bergman & Lane, 1990). Masalah teori ini terwujud melalui adanya fenomena *flypaper effect*.

2.2 Teori Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi

Adam Smith (1776) melihat proses pertumbuhan ekonomi melalui pertumbuhan *output* total dan pertumbuhan penduduk (Arsyad, 2010:74). Pertumbuhan *output* total terlihat dalam SDA yang merupakan tahap awal produksi masyarakat. SDA digunakan seluruhnya optimal dapat menghentikan pertumbuhan *output*, jika tidak maka penduduk dan stok modal masih berpengaruh pada pertumbuhan *output*. SDM memiliki pengaruh statis terhadap pertumbuhan *output* sesuai penawaran dan permintaan tenaga kerja. Spesialisasi dan kelompok kerja dilakukan berdasarkan pengaruh stok modal aktif yang berakibta pada peningkatan keterampilan dan optimalisasi waktu pekerja (Badrudin, 2017:126-127).

Harrod-Domar merupakan hasil dari sumbangsi dua tokoh dengan kesimpulan yang sama. Teori ini berfokus pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Berasumsi jika perekonomian dibagi menjadi rumah tangga dan perusahaan dengan mengabaikan sektor pemerintah dan luar negeri. Selanjutnya tumbungan masyarakat menjadi alokasi pendapatan nasional dengan *marginal propensity to save* (MPS) dan *capital-output ratio* (COR) serta *incremental capital-output ratio* (ICOR) dianggap konstan.

Solow-swan menilai pembangunan dan pertumbuhan ekonomi perlu melihat pertumbuhan faktor demografi, faktor tenaga kerja, jumlah modal dan perkembangan teknologi. Nicholas Kaldor dalam teorinya membagi kelas masyarakat menjadi kapitalis dan buruh (Djojohadikusumo, 1994) dengan empat bagian masyarakat sosio-ekonomis yaitu perkotaan/ pedesaan dan industri/ jasa. Teori ini memiliki pendekatan *stylized facts* dalam pengujian empiris-kuantitatif untuk melawan teori Neo-Keynes dan Neo-Klasik dan menganggap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi berbeda karena arti dan dampak yang berbeda. Oleh karena itu, ilmu yang berhubungan dengan peningkatan produksi barang dan jasa secara nasional diikuti oleh peningkatan hasil produksi nasional yaitu pertumbuhan ekonomi nasional. Sedangkan ilmu yang menggali pembahasan pergantian tatanan struktur ekonomi menyeluruh dengan berjalannya waktu diikuti dengan landasan kegiatan ekonomi atau dengan struktur ekonomi rakyat negara tersebut yaitu pembangunan ekonomi nasional (Djojohadikusumo, 1994).

2.3 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) ialah hasil tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat sesuai periode ditetapkan dan sebagai alat kendali terhadap transparansi penggunaan anggaran dan koreksi pelayanan publik oleh masyarakat.

2.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah diperoleh melalui pengorbanan yang dilakukan atas pemberdayaan sumber daya daerah. Pendapatan daerah yang berasal dari sumber daya khas daerah hal ini juga yang menjadi cermin keberhasilan realisasi kebijakan publik yaitu PAD. PAD ini akan terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

2.5 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana perimbangan merupakan dana yang diberikan pemerintah pusat untuk membantu keberlangsungan kegiatan pemerintahan daerah. *Unconditional grant* yang merupakan dana perimbangan dengan wewenang penggunaan bebas terdiri dari DAU dan DBH. DAU akan diberikan pada pemerintah daerah paling kecil 26% dari pendapatan dalam negeri neto (Aminus, 2018). Pemberian tergantung pada kesenjangan fiskal dan alokasi dasar serta 10% akan diberikan kepada provinsi dan sisanya kepada kabupaten/ kota.

2.6 Belanja Modal

Belanja modal merupakan kewajiban hasil dari seluruh pengeluaran anggaran pada tahun yang bersangkutan. Belanja modal akan digunakan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menjembatani permintaan masyarakat dengan penyediaan sarana dan prasarana di luar milik swasta. Belanja modal memiliki pengaruh langsung terhadap kegiatan pemerintah daerah melalui belanja langsung. Belanja modal yang langsung alokasinya dalam APBD digunakan dalam realisasi penyediaan sarana dan prasarana publik. Belanja modal akan terdiri dari tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya (Yuwono et al., 2008).

2.7 Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat hasil dari kesuksesan pembangunan nasional dan daerah. Banyaknya pilihan yang tersedia dan mampu diakses oleh masyarakat wujud dari kesejahteraan masyarakat. wujud kesejahteraan masyarakat ini hasil sumbangsi dari faktor ekonomi dan non ekonomi (Badrudin, 2012). Perhitungan kesejahteraan diperkenalkan yaitu IPM oleh *United*

nations development program (UNDP) pada tahun 1990 formula IPM masih digunakan hingga saat ini oleh nasional dan daerah di Indonesia (BPS, 2020). IPM akan dilihat melalui komponen usia, pengetahuan dan kelayakan hidup dimana tiga komponen mewakili faktor ekonomi dan non ekonomi.

2.8 Teori *Flypaper Effect*

Besaran dana perimbangan sering kali menimbulkan pengeluaran meningkat setiap tahunnya karena tuntutan penggunaannya. Hal ini menimbulkan fenomena baru dari alokasi tanpa syarat dana perimbangan direspon asimetris dalam belanja daerah yaitu fenomena *flypaper effect*. Fenomena ini terjadi ketika penerimaan dana alokasi direalisasikan dalam belanja daerah tanpa berdampak pada peningkatan pendapatan daerah (Ishak *et al.*, 2019). Akibat dari fenomena ini terjadi elastisitas pengeluaran atas alokasi transfer lebih besar dari elastisitas pengeluaran atas alokasi penerimaan pajak daerah (Kuncoro, 2007). Hasil dari keberadaan fenomena ini yaitu, kesenjangan fiskal masih ada, pemanfaatan sumber PAD yang kurang maksimal, ketergantungan dana perimbangan, dan adanya respon berlebihan dana transfer sehingga kemandirian daerah rendah (Mulya & Bustamam, 2016).

2.9 Pengembangan Hipotesis

Penelitian ini akan menguji dan menganalisis pengaruh *flypaper effect* terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui rumusan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

2.9.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Beberapa penelitian sebelumnya melihat pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal sejalan dengan penelitian dilakukan oleh (Arwati & Hadiati, 2013), (Mawarni *et al.*, 2013), dan (Sumarmi, 2010) membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Pendapatan asli daerah mampu memengaruhi secara signifikan pada belanja daerah (Afrizawati, 2011). Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu asal dari penerimaan terbesar yang mendukung keberlangsungan kegiatan daerah atas belanja daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka pengajuan hipotesis adalah:

H₁: Pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 2016-2020

2.9.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Beberapa penelitian sebelumnya dilakukan guna melihat pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja modal sejalan dengan penelitian dilakukan oleh Penelitian (Darmayasa, 2013), (Sari, 2018) dan (Karwur *et al.*, 2018). Penelitian itu melihat akibat dari pemberian wewenang seluas-luasnya pada pemerintah daerah terhadap DAU. Penelitian (Solikin, 2016) melihat bahwa penggunaan DAU saat ini merubah formulasi seharusnya fungsi DAU. Hal ini akibat dari pergeseran tujuan pemerintah terhadap pemberian DAU akan kesenjangan fiskal daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka pengajuan hipotesis adalah:

H₂: Dana alokasi umum (DAU) berpengaruh positif terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2020.

2.9.3 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Beberapa penelitian sebelumnya dilakukan guna melihat pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi sejalan dengan penelitian dilakukan oleh penelitian (Wahyudin & Yuliadi, 2013), (Arini S & Kusuma, 2019), dan (Arini S, 2016). Penelitian di atas menunjukkan pengaruh yang positif signifikan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hal itu disebabkan karena keberadaan sarana dan prasarana publik dari belanja modal menghasilkan peningkatan pendapatan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan uraian tersebut, maka pengajuan hipotesis adalah:

H₃: Belanja Modal (BM) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2020.

2.9.4 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Beberapa penelitian sebelumnya dilakukan guna melihat pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi sejalan dengan penelitian dilakukan oleh penelitian (Hadi, 2009), (Komariah *et al.*, 2019), dan (De Fretes, 2017). Penelitian diatas mendukung bahwa pertumbuhan ekonomi mampu mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara positif dan signifikan. Hal itu disebabkan karena pertumbuhan ekonomi yang baik sebagai cermin kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, maka pengajuan hipotesis adalah:

H₄: Pertumbuhan ekonomi (PE) berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat/ indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2020

3 METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan unit analisis setingkat pemerintah daerah kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat dengan jenis penelitian kuantitatif meliputi seluruh Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2020 sekaligus menjadi populasi dengan sampel diambil dengan teknik *purposive sampling* dengan tujuan tertentu dalam memilih sampel tanpa mengacaknya. Berupa data yang digunakan secara keseluruhan berjumlah 135 data (18 kabupaten dan 9 Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2020).

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang mana diperoleh dengan cara tidak turun langsung ke lapangan (Sugiyono, 2008) laporan realisasi APBD pada bagian PAD, DAU, dan BM serta data PE dan KM melalui IPM. Sumber data laporan realisasi APBD bagian PAD, DAU, BM diperoleh dari situs resmi direktorat jendral perimbangan keuangan (DJPK). Data PE dan IPM diambil pada situs resmi badan pusat statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat dan didukung oleh sumber pendukung berupa buku, jurnal ilmiah, undang-undang, *website*, dan *e-book* yang berkaitan dengan penelitian ini. Menurut Maimunah dalam Armawaddin *et al.*, (2017), keterjadian *flypaper effect* apabila dampak pada nilai koefisien Dana Perimbangan (DAU, DBH, DAK) pada belanja daerah lebih besar daripada dampak PAD pada belanja daerah dengan syarat pengaruh keduanya signifikan.

4 HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Deskriptif

Data pada Tabel 1 menunjukkan kemampuan luar biasa yang dilakukan pemerintah kabupaten dan kota dalam meningkatkan PAD dalam alokasi total Pendapatan Daerah (PD) dilihat dari 2016 sebesar 21,47 persen, 2017 sebesar 26,45 persen, 2018 sebesar 23,85 persen, 2019 sebesar 23,75 persen, dan 2020 sebesar 27,50 persen meskipun masih perlu bantuan dari DAU oleh pusat dari total alokasi PD 2016 sebesar 38,01 persen, 2017 sebesar 35,65 persen, 2018 sebesar 35,13 persen, 2019 sebesar 33,36, dan 2020 sebesar 34,94 persen. Porsi DAU masih jauh lebih besar daripada porsi PAD namun DAU akan menurun seiring dengan peningkatan PAD.

Tabel 1 Proporsi PAD dan DAU Terhadap PD

Tahun	Porsi PAD (%)	Porsi DAU (%)
2016	21,47	38,01
2017	26,45	35,65
2018	23,85	35,13
2019	23,76	33,36
2020	27,50	34,94

Tabel 2 Analisis Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Rata-Rata	Standar Deviasi
PAD	135	66.385.348.153,00	3.161.165.915.498,00	768.770.438.882,9633	726.865.118.467,38060
DAU	135	351.736.779.000,00	2.149.817.107.000,00	1.127.159.157.757,9548	454.703.861.139,48470
BM	135	28.238.039.658,00	1.567.693.720.671,00	558.703.037.709,9185	333.584.019.345,85390
PE	135	-3,59	7,85	4,27	3,03
KM	135	62,92	81,62	70,80	4,88

Data pada Tabel 2 menunjukkan hasil analisis deskriptif secara statistik dilihat dari PAD minimum dimiliki Kabupaten Pangandaran pada tahun 2016 dengan jumlah Rp66.385.348.153,00 dan jumlah PAD maksimum dimiliki oleh Kabupaten Bogor pada tahun 2019 dengan jumlah Rp3.161.165.915.498,00 serta rata-rata PAD dengan jumlah Rp768.770.438.882,9633 dan standar deviasi dengan jumlah Rp726.865.118.467,38. Terlihat DAU minimum dimiliki Kota Banjar pada tahun 2020 dengan jumlah Rp351.736.779.000,00 dan jumlah DAU maksimum dimiliki oleh Kabupaten Bandung pada tahun 2019 dengan jumlah Rp2.149.817.107.000,00 serta rata-rata DAU dengan jumlah Rp1.127.159.157.757,9548 dan standar deviasi dengan jumlah Rp454.703.861.139,48. Oleh karena itu, DAU masih cenderung tinggi dalam pendapatan daerah.

Terlihat BM minimum dimiliki Kabupaten Purwakarta pada tahun 2020 dengan jumlah Rp28.238.039.658,00 dan jumlah BM maksimum dimiliki oleh Kabupaten Bogor pada tahun 2019 dengan jumlah Rp1.567.693.720.671,00 serta rata-rata BM dengan jumlah Rp558.703.037.709,92 dan standar deviasi dengan jumlah Rp333.584.019.345,85390. Oleh karena itu, alokasi BM masih sangat rendah realisasinya. Terlihat PE minimum dimiliki Kabupaten Karawang pada tahun 2020 sebesar -3,59% dan jumlah PE maksimum dimiliki oleh Kota Cimahi pada tahun 2019 dengan 7,85, serta rata-rata PE sebesar 4,27% dengan standar deviasi sebesar 3,03%. Oleh karena itu, PE masih dikatakan cenderung mengarah ke rendah. Terlihat KM minimum dimiliki Kabupaten Cianjur pada tahun 2016 sebesar 62,92 dan jumlah KM maksimum dimiliki oleh Kota Bandung pada tahun 2019 sebesar 81,62 serta rata-rata KM sebesar 70,80 dan standar deviasi sebesar 4,88. Oleh karena itu KM menunjukkan angka yang relatif setara antardaerah.

4.2 Analisis Induktif

Tabel 3 *R-Square*

Variabel	<i>R-Square</i>	keterangan
Belanja Modal	0,715	PAD dan DAU mampu mempengaruhi dan menjelaskan BM sebesar 71,5% lalu sisanya sebesar 28,5% dijelaskan oleh variabel lain
Pertumbuhan Ekonomi	0,000	BM tidak mampu mempengaruhi dan menjelaskan PE karena hanya sebesar 0,00% karena 100% lainnya dijelaskan oleh variabel lain
Kesejahteraan Masyarakat	0,032	PE mampu mempengaruhi dan menjelaskan KM sebesar 3,2% lalu 96,8% lainnya dijelaskan oleh variabel lain

Tabel 4 Koefisien Jalur

Hipotesis	Sampel Asli	Rata-Rata Sampel	Standar Deviasi	T Statistik	P Value	Prediksi	Temuan	Keputusan
PAD → BM	0,607	0,604	0,047	12,813	0,000	+	+	Diterima*
DAU → BM	0,371	0,374	0,050	7,493	0,000	+	+	Diterima*
BM → PE	0,179	0,176	0,085	2,114	0,017	+	+	Diterima*
PE → KM(IPM)	0,003	0,008	0,094	0,030	0,488	+	+	Ditolak**

Keterangan: * = *T Statistic* > 1,96 dan *P Value* < 0,05

** = *T Statistic* < 1,96 dan *P Value* > 0,05

Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa *t statistic* 12,813 lebih besar daripada *t* tabel 1,96 dan *p value* 0,000 lebih kecil dari 0,05, kemudian nilai sampel asli sebesar 0,607. Oleh karena itu, berarti PAD berpengaruh signifikan dan positif terhadap BM. Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa *t statistic* 7,493 lebih besar daripada *t* tabel 1,96 dan *p value* 0,000 lebih kecil dari 0,05, kemudian nilai sampel asli sebesar 0,371.

Oleh karena itu, berarti DAU berpengaruh signifikan dan positif terhadap BM. Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa *t statistic* 2,114 lebih besar daripada *t* tabel 1,96 dan *p value* 0,017 lebih kecil dari 0,05, kemudian nilai sampel asli sebesar 0,179. Oleh karena itu, BM berpengaruh signifikan dan positif terhadap PE. Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa *t statistic* 0,030 lebih kecil daripada *t* tabel 1,96 dan *p value* 0,488 lebih besar dari 0,05, kemudian nilai sampel asli sebesar 0,003. Oleh karena itu, berarti PE tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap KM (IPM). Hasil uji menunjukkan bahwa nilai koefisien PAD yaitu 0,607 terhadap BM dengan pengaruh signifikan yaitu *t statistic* 12,812 dan *p value* 0,000 lebih besar dibandingkan nilai koefisien DAU yaitu 0,371 dengan pengaruh signifikan yaitu *t statistic* 7,493 dan *p value* 0,000.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengujian pada data penelitian ini menetapkan bahwa PAD berpengaruh signifikan dan positif terhadap BM di Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2020. Hal ini dibuktikan melalui besaran t statistic $12,813 > t$ tabel $1,96$ dan signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ kemudian PAD juga mampu mempengaruhi BM sebanyak $0,715$ atau $71,5\%$.

Pengaruh signifikan dan positif ini merupakan bentuk dari usaha pemerintah dalam peningkatan kemandirian daerah melalui pengelolaan sumber daya asli milik daerah. Alokasi belanja modal yang diperoleh atas PAD akan digunakan seoptimal mungkin sehingga mampu melahirkan imbal balik yang baik kepada pemerintah daerah dengan peningkatan PAD. Pemerintah Jawa Barat membuka peluang akses ekonomi Jawa Barat dengan melakukan pembangunan infrastruktur jalan Jawa Barat bagian selatan. Pembangunan ini diharapkan memberikan manfaat pada masyarakat penggiat kegiatan ekonomi (Bapenda, 2016). Adanya perkembangan teknologi pemerintah daerah berharap mampu melahirkan efek positif pada PAD atas pajak (Harahap, 2020). Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melalui delapan pintu pendanaan pembangunan guna realisasi dana pembangunan (Pemkab Kuningan, 2019).

Penelitian ini mendukung beberapa penelitian terdahulu, yaitu penelitian (Arwati & Hadiati, 2013), (Mawarni *et al.*, 2013), dan (Sumarmi, 2010). Pada penelitian terdahulu menunjukkan bahwa PAD berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja modal.

4.3.2 Pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja modal

Hasil pengujian menunjukkan bahwa DAU berpengaruh signifikan dan positif terhadap BM di Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2020. Hal ini dibuktikan dengan besaran t statistic $7,493 > t$ tabel $1,96$ dan signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ kemudian DAU juga mampu mempengaruhi BM sebanyak $0,715$ atau $71,5\%$.

Hasil penelitian ini menemukan adanya pengaruh signifikan dan positif diakibatkan karena sifat DAU yang termasuk dalam *unconditional grant*. DAU ini berfungsi sebagai penghilang celah fiskal yang terjadi antardaerah maupun dengan antarpemerintah (pusat-daerah). Tujuan DAU tercapai dengan besaran DAU setiap tahun anggaran memungkinkan adanya pengaruh positif dan signifikan terhadap besaran anggaran belanja modal. Sehingga pembangunan, pelelangan, pembelian, dan pengadaan aset tetap pemerintah daerah yang akan meningkatkan mobilitas masyarakat.

Penelitian ini mendukung hasil dari beberapa penelitian terdahulu, yaitu penelitian (Darmayasa, 2013), (Sari, 2018), dan (Karwur *et al.*, 2018). Pada penelitian terdahulu itu menunjukkan hasil bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

4.3.3 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil pengujian pada data penelitian ini menunjukkan bahwa BM berpengaruh signifikan dan positif terhadap PE di Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2020. Hal ini dibuktikan dengan besaran t statistic $2,114 > t$ tabel $1,96$ dan signifikansi sebesar $0,017 < 0,05$ kemudian BM kurang mampu mempengaruhi PE karena besarnya hanya $0,00\%$ dan seluruhnya dijelaskan oleh variabel lain.

Alokasi BM digunakan sebagaimana fungsinya untuk pengadaan, pembelian, pembangunan, dan pelelangan untuk aset tetap. Alokasi BM fungsinya untuk pengadaan, pembelian, pembangunan, dan pelelangan aset tetap dilihat melalui berbagai realisasi pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana publik. Kegiatan masyarakat lancar mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kekuatan kegiatan yang dilakukan rumah tangga dan perusahaan. Pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat terpuruk

seiring dengan mewabahnya *Covid-19*. Pemerintah pusat mengusahakan pemulihan ekonomi nasional pasca *Covid-19*. Pemerintah daerah Jawa Barat mengusahakan pembangunan infrastruktur prioritas utama yaitu; air, transportasi, dan keterhubungan sehingga percepatan pembangunan beberapa daerah mampu mendukung pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Barat (Deny, 2021). Hasil uji penelitian ini mendukung hasil dari beberapa penelitian terdahulu, yaitu penelitian (Wahyudin & Yuliadi, 2013), (Arini S & Kusuma, 2019), dan (Arini S, 2016). Pada penelitian terdahulu itu menunjukkan hasil bahwa BM berpengaruh signifikan dan positif terhadap PE.

4.3.4 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Pengujian yang telah dilakukan oleh penelitian ini maka PE menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan serta positif terhadap KM pada seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2020. Oleh karena itu terbukti dengan besaran *t statistic* 0,030 < *t* tabel 1,96 dan signifikansi sebesar 0,488 > 0,05 kemudian PE hanya mampu mempengaruhi IPM dengan hanya sebesar 0,3% dan sisanya 99,7% dijelaskan oleh variabel lain.

Pada dasarnya KM yang terwakilkan oleh indeks pembangunan manusia dilihat tidak hanya melalui faktor keuangan namun juga faktor non keuangan. IPM sendiri menilai KM melalui tiga komponen yaitu, usia, pengetahuan, dan kelayakan hidup sebagai alat penentu KM. Pertumbuhan ekonomi mampu mendukung kesejahteraan masyarakat karena distribusi pendapatan yang terjadi dianggap mampu mewakili daya beli masyarakat. Tidak ada pengaruh PE terhadap KM ini diakibatkan juga karena pengukuran IPM yang dilakukan melalui dimensi moneter (standar kelayakan hidup) dan non moneter (usia dan pengetahuan). KM akan terwujud dalam waktu yang tidak singkat serta dengan anggaran yang banyak untuk mendapatkan hasil KM yang memuaskan dalam prosesnya.

Hasil uji pada penelitian ini tidak mendukung hasil dari beberapa penelitian terdahulu, yaitu penelitian (Hadi, 2009), (Komariah et al., 2019), dan (De Fretes, 2017). Pada penelitian terdahulu itu menunjukkan hasil bahwa PE berpengaruh signifikan dan positif terhadap IPM.

4.4 Analisis Flypaper Effect

Penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat *flypaper effect* di Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2020. Hasil uji menunjukkan bahwa PAD memiliki *t statistic* 12,813, dengan *p value* 0,000 serta nilai koefisien 0,607 lebih besar dari DAU memiliki *t statistic* 7,493, dengan *p value* 0,000 serta nilai koefisien 0,371. Hal itu menunjukkan keterpenuhan syarat pengaruh yang sama-sama signifikan PAD dan DAU, namun nilai dampak (koefisien) PAD yang lebih besar dari nilai dampak (koefisien) DAU terhadap BM.

Seluruh Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Barat mampu membiayai belanja modal dengan pendapatan asli daerah (PAD) yang dibuktikan oleh hasil uji penelitian ini. penelitian ini mendukung hasil dari beberapa penelitian terdahulu, yaitu penelitian (Iskandar, 2012), (Al Khoiri, 2015), dan (Darmayasa, 2013). Pada penelitian terdahulu itu menunjukkan hasil bahwa tidak terdapat *flypaper effect* pada BM.

5 KESIMPULAN

PAD memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap belanja modal atau selanjutnya disebut BM di Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2020. Dana alokasi umum atau selanjutnya disebut DAU memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap BM di

Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2020. BM memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi atau disebut PE di Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2020. PE tidak memiliki pengaruh signifikan namun positif terhadap kesejahteraan masyarakat atau disebut KM di Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2020. Penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat *flypaper effect* karena pengaruh signifikan PAD yang lebih besar pada BM di Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2020 dibandingkan pengaruh signifikan DAU terhadap BM di Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2020. Pengujian yang dilakukan menunjukkan tidak adanya *flypaper effect* melihat pengaruh positif dan signifikan BM terhadap PE dan tidak adanya pengaruh signifikan dan positif PE terhadap KM di Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Barat. Hal itu menunjukkan bahwa realisasi belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah hanya mampu meningkatkan PE tanpa melihat faktor faktor lain yang mendukung KM.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizawati. (2011). Analisis Flypaper Effect pada Belanja Daerah Kabupaten/ Kota di Sumatera. *Kajian Ekonomi*, 10(1), 1–20. <https://doi.org/10.1057/9780230226203.1901>
- Al Khoiri, R. H. (2015). Flypaper Effect Dan Belanja Daerah Di Propinsi Jawa Barat. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 4(2), 211–230. <https://doi.org/10.15408/sjie.v4i2.2306>
- Aminus, R. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah ogan ilir. *Jurnal Ekonomi Global Masa Kini Mandiri*, 9(1), 47–56. <https://doi.org/10.34209/equ.v22i2.936>
- Arini S, P. R. (2016). *Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Pulau Kalimantan*. 2(2), 180–198.
- Arini S, P. R., & Kusuma, M. W. (2019). Pengaruh Belanja Modal Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Investasi Swasta Di Indonesia Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 5(1), 28. <https://doi.org/10.26486/jramb.v5i1.611>
- Armawaddin, M., Rumbia, W. A., & Afiat, M. N. (2017). Flypaper Effect Analysis of District and City Locally Spending in Sulawesi. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 18(1), 77–91. <https://media.neliti.com/media/publications/238203-analisis-flypaper-effect-belanja-daerah-01496859.pdf>
- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan* (5th ed.). Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN Yogyakarta.
- Arwati, D., & Hadiati, N. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat. *Seminar Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi Terapan 2013*, 3(1), 498–507.
- Badrudin, R. (2012). *pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap IPM menggunakan data kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah*.

- Badrudin, R. (2017). *EKONOMIKA OTONOMI DAERAH* (Kedua). UPP STIM YKPN.
- Bapenda. (2016). *PAD dan Peningkatan Infrastruktur di Jawa Barat*. Bapenda Jabar. <https://bapenda.jabarprov.go.id/2016/05/28/pad-dan-peningkatan-infrastruktur-di-jawa-barat/>
- Bergman, M., & Lane, J. E. (1990). Public Policy in a Principal-Agent Framework. *Journal of Theoretical Politics*, 2(3), 339–352. <https://doi.org/10.1177/0951692890002003005>
- BPS. (2020). *Indeks Pembangunan manusia*. 143.
- Darmayasa, I. N. (2013). FLYPAPER EFFECT DAU DAN PAD TERHADAP BELANJA MODAL SERTA PENGARUH BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI , PENDAPATAN PER KAPITA , DAN IPM. *Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali*, 139–153.
- De Fretes, P. N. (2017). Pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kepulauan Yapen. *Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE. UN PGRI Kediri*, 2(2), 1–33.
- Deny, S. (2021). *Ridwan Kamil Usul Pembangunan Infrastruktur Air hingga Transportasi di Jabar*. Liputan6.Com. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4484805/ridwan-kamil-usul-pembangunan-infrastruktur-air-hingga-transportasi-di-jabar>
- Djojohadikusumo, S. (1994). *Perkembangan Pemikiran Ekonomi : dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan* (Edisi Pert). Pustaka LP3ES.
- Dwiyandari, L. D. Y., & Badera, I. dewa N. (2018). Pengaruh Kinerja Keuangan pada Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi dan Implikasinya pada Indeks Pembangunan Manusia Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia email : ddini.yasinthaa@yahoo.co.id / Telp : + 6281547124301. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 22(3), 1741–1770.
- Eisenhardt, K. M., & Eisenhardt, K. M. (2018). *Linked references are available on JSTOR for this article : Agency Theory : An Assessment and Review*. 14(1), 57–74.
- Hadi, S. (2009). Analisis Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan Antar Daerah Dan Tenaga Kerja Terserap Terhadap Kesejahteraan Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Dalam Era Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 16(1), 50–69.
- Harahap, R. (2020). *Bapenda Kota Bogor lakukan Terobosan Tingkatkan PAD*. ANTARA NEWS.COM. <https://www.antaranews.com/berita/1347270/bapenda-kota-bogor-lakukan-terobosan-tingkatkan-pad>
- Herman. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kota Pekanbaru. *Eko Dan Bisnis: Riau Economic and Business Review*, 8(1), 182–189.
- Ishak, K., Arafah, R., & M, H. (2019). Flypaper Effect Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Belanja Daerah Di Kota Parepare. *Economos* :

- Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 51. <https://doi.org/10.31850/economos.v2i2.522>
- Iskandar, I. (2012). Flypaper Effect Pada Unconditional Grant. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 13(1), 113–131. <https://doi.org/10.23917/jep.v13i1.186>
- Jensen, C., & Meckling, H. (1976). *THEORY OF THE FIRM: MANAGERIAL BEHAVIOR, AGENCY COSTS AND OWNERSHIP STRUCTURE I. Introduction and summary In this paper WC draw on recent progress in the theory of (1) property rights, firm. In addition to tying together elements of the theory of e. 3, 305–360.*
- Karwur, J. C., Ilat, V., & Warongan, J. D. . (2018). Flypaper Effect Atas Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(2), 88–98. <https://doi.org/10.32400/gc.13.02.19104.2018>
- Komariah, D., Yogiandoro, M., & Hukom, A. (2019). Pengaruh Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis Fakultas Ekonomi UNIAT*, 4(S1), 523–532.
- Kuncoro, H. (2007). Aspp-08 1 Fenomena Flypaper Effect Pada Kinerja Keuangan Pemerintah. *Simposium Nasional Akuntansi X, juli*.
- Kusumadewi, D. A., & Rahman, A. (2007). Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 11(1), 67–80.
- Mawarni, Darwanis, & Syukriy, A. (2013). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL SERTA DAMPAKNYA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH (STUDI PADA KABUPATEN DAN KOTA DI ACEH). *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 2(2), 80–90.
- Mirza, D. S. (2012). Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Jawa Tengah Tahun 2006-2009. *Economics Development Analysis Journal*, 1(2), 1–15. <https://doi.org/10.15294/edaj.v1i2.474>
- Mulya, R., & Bustamam. (2016). Pengaruh Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pemerintah/ Kota. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 1(2), 190–198. lib.unnes.ac.id/6871/1/8479.pdf%0Ahttp://www.albayan.ae
- Pemkab Kuningan. (2019). *Ada 8 Pintu Pendanaan Pembangunan*. Pemerintah Kabupaten Kuningan. <https://www.kuningankab.go.id/berita/ada-8-pintu-pendanaan-pembangunan>
- Sari, I. N. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pad Dan Dana Alokasi Umum. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(12), 1–19.

- Solikin, A. (2016). Analisis Flypaper Effect Pada Pengujian Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dan Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah Di Indonesia (Studi Tahun 2012-2014). *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 16(1), 11. <https://doi.org/10.20961/jab.v16i1.187>
- Subadriyah, & Solikul, H. (2018). Analisis flaypaper effect pada belanja daerah kabupaten dan kota di provinsi jawa tengah. *Jurnal Ekonomi Optimum*, 8(2), 183–194.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. ALFABETA.
- Sumarmi, S. (2010). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi D.I. Yogyakarta. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Yogyakarta*.
- Wahyudin, D., & Yuliadi, I. (2013). Determinan Pertumbuhan Ekonomi Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 14(2), 120–126. <https://doi.org/10.18196/jesp.14.2.1255>
- Yuwono, S., Utomo, D. C., Zein, S. H., & H., A. A. R. (2008). *Memahami APBD dan Permasalahannya (Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah)*.